



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199 /PMK.07/2013

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

AK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut Alokasi Kurang Bayar DBH PBB adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dibagihasilkan kepada daerah.

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH PBB adalah sebesar Rp6.208.697.901,00 (enam miliar dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp48.928.539,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota sebesar Rp13.042.370,00 (tiga belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 2. Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada seluruh kabupaten dan kota sebesar Rp35.886.169,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
 - b. Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.929.297.684,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 1. Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp180.232.363,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah); dan

AKS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp5.749.065.321,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- c. Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp230.471.678,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 1. Biaya Pemungutan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp16.020.653,00 (enam belas juta dua puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 2. Biaya Pemungutan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp214.451.025,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember 2014.
- (2) Penyaluran Alokasi Kurang Bayar DBH PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

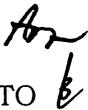
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1557

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199 /PMK.07/2013
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TAHUN
ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN SECARA
MERATA KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

Daerah	DBH PBB Bagi Rata	DBH PBB Insentif	Jumlah
Provinsi DKI Jakarta	13.042.370	35.886.169	48.928.539

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.07/2013
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TAHUN
ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DAN
TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

No	Daerah	DBH PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011	DBH PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012
1	Provinsi Sumatera Utara	-	63.055.835
2	Kota Medan	-	252.223.341
3	Provinsi Sumatera Selatan	-	1.889.425
4	Kota Palembang	-	7.557.703
5	Provinsi Jawa Tengah	-	7.865.727
6	Kota Semarang	-	31.462.911
7	Provinsi Jawa Timur	-	39.681.505
8	Kab. Gresik	-	158.726.025
9	Provinsi Kalimantan Barat	36.046.472	4.072.327
10	Kota Pontianak	144.185.891	16.289.311
11	Provinsi Kalimantan Timur	-	1.031.969.792
12	Kota Samarinda	-	4.127.879.170
13	Provinsi Gorontalo	-	370.097
14	Kota Gorontalo	-	1.480.391
15	Provinsi Sulawesi Tengah	-	908.352
16	Kota Palu	-	3.633.409
Total		180.232.363	5.749.065.321

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/PMK.07/2013
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TAHUN
ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DAN
TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

No	Daerah	Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011	Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012
1	Provinsi Sumatera Utara		1.401.240
2	Kota Medan		26.623.574
3	Provinsi Sumatera Selatan		52.484
4	Kota Palembang		787.260
5	Provinsi Jawa Tengah		205.382
6	Kota Semarang		3.290.496
7	Provinsi Jawa Timur		1.102.263
8	Kab. Gresik		6.176.266
9	Provinsi Kalimantan Barat	1.001.290	113.120
10	Kota Pontianak	15.019.363	1.696.803
11	Provinsi Kalimantan Timur		28.665.827
12	Kota Samarinda		143.768.111
13	Provinsi Gorontalo		10.280
14	Kota Gorontalo		154.207
15	Provinsi Sulawesi Tengah		23.718
16	Kota Palu		379.994
	Total	16.020.653	214.451.025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

